

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan*, UU No. 23 Tahun 2006 j.o UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006.

_____, *Undang-Undang tentang Pelayanan Publik*, UU No. 25 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

_____, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 23 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013*, PP No. 40 Tahun 2019.

_____, *Peraturan Kementerian Dalam Negeri (PERMENDAGRI) tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019, Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1789.

_____, *Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*, PERDA Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 j.o PERDA Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan PERDA Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016..

B. Buku

Abdul Razak, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Pers, 2000.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung Tbk. 2002.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung Tbk. 2002.

- Albrecht, *Dalam Sedarmayanti, Teori Pelayanan Publik* (Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2010).
- Dadan Juliantara, *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan, 2005.
- Diyanto, Agus, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2015.
- Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, Yogyakarta: Gava Media, 2011.
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2010.
- Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: ANDI, 2002.
- Monir, *Dalam Harbani, Pasolong Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Muchsin, *Perlindungan Hukum*, Bali: Pustaka, 2009.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Nuktoh Arfawie Kurdie, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Nuktoh Arfawie Kurdie, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Putra Fadhillah, *New Public Governance*, Malang: UB Press, 2012.

- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ratminto dan atik septi winarsih, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sedarmayanti, *Good Governance, Pemerintahan yang Baik dalam Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Maju 2003.
- Sinambela, *Administrasi Publik*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*, Bandung: Binacipta. 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

C. Lain-Lain

- Anonim, "Perlindungan Hukum", diakses melalui <http://statushukum.com/perlidungan-hukum.html> pada tanggal 27 April 2022.
- Hasnas Aziz, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak", *Lex Journalica Volume 15*, Nomor 1, April 2018.
- Hukum Online, "Perlindungan Hukum" diakses melalui <https://www.hukumonline.com> pada tanggal 7 Agustus 2022.
- Hukum Online, "Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 Amandemen 2002", diakses melalui <https://www.hukumonline.com> pada tanggal 08 Agustus 2022.
- Indah Permata Sari, dan Siti Ummu Adillah, "Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang", *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA*, Oktober 2020.
- Rio Admiral Parikesit, "Penerapan Asas Legalitas (*Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur*) Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisan

peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18
No. 4 Desember 2021.

S.F Marbun, “Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Hukum Ius Quia
Iustum*, No.9 Vol. 4, hlm. 9.

Tommy A. Legowo, “Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, *Good Governance*
dan Masa Depan Otonomi Daerah”, *Jurnal Desentralisasi*, Vol. 6 No.
4, 20